# Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Pertanggungjawaban Pada Tingkat Pendapatan Zakat Dalam Mengelola Laporan Keuangan

# (Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung 2015)

1Riswan Al Husaeri, 2Edi Sukarmanto, 3Nurhayati

1,2Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: 1Riswan.alhusaeri.ra@gmail.com,2Edi06sukarmanto@gmail.com2Nurhayati\_kanom@yahoo..com

**Abstract.** This study aims to determine the application of accountability, transparency and accountability at the level of zakat income in managing financial statements at Institute Amil Zakat in Bandung city. As for Zakat and infak / Sedekah already known and implemented by Muslims for a long time. This research was conducted at 6 Institutions Amil Zakat in Bandung City: Dompet Dhuafa, Yayasan Baitul Maal BRI, Rumah Zakat (RZ), Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Yatim and Yatim Mandiri with research method descriptive method qualitative approach. Data source used is primary and secondary data source. The data collection techniques used are questionnaires. The results of research on Amil Zakat Institution in Bandung shows that the application of accountability at the level of zakat income is included in the criteria very well. The results of research on transparency indicate very good criteria, as well as with accountability at the level of zakat income shows very good criteria. Based on the research that has been done, it is suggested: (1) For the researcher who will conduct the next research process, it is better to develop the research that has been done nowadays, by adding another variable not found in this research which is believed can influence to zakat income level, Variable Information Quality.

**Keywords: Accountability, Responsibility, Transparency**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat dalam mengelola laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat Kota Bandung (2015). Adapun Zakat dan infak/sedekah sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Penelitian ini dilakukan di 6 Lembaga Amil Zakat Kota Bandung diantaranya, Dompet Dhuafa, Yayasan Baitul Mal BRI, Rumah Zakat (RZ), Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rumah Yatim dan Yatim Mandiri, dengan metode penelitian metode deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil penelitian pada transparansi menunjukkan kriteria sangat baik, begitupun dengan pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat menunjukan kriteria sangat baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan : (1) Bagi peneliti yang akan melakukan proses penelitian selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan saat ini, yaitu dengan menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yang diyakini dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan zakat, seperti Variabel Kualitas Informasi.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Transparansi**

1. **Pendahuluan**

Zakat dan infak/sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat dan infak/sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama, berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infak/sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (No. 109) memberikan pengertian Zakat sebagai berikut : Zakat adalah kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung, ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Adapun Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Sebagaimana dikemukakan Depag RI (2007) bahwa Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Dampak yang terjadi jika pengelolaan laporan keuangan tidak dilakukan secara professional yang mengabaikan unsur akuntabilitas dan transparan salah satunya ialah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan laporan keuangan. Ada beberapa kasus yang mencerminkan kecurangan dalam pengelolaan laporan keuangan, diantaranya: Walikota Surabaya, pernah membekukan dana bazda Surabaya sebesar 300 juta rupiah. Hal ini karena buruknya tata kelola bazda, dimana terdapat dugaan penyelewengan sebesar 50%. Penyelewengan ini berupa gaji yang besar, dana studi banding yang besar, sehingga penyaluran hanya 50% (Surabayanews 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat
2. Untuk mengetahui penerapan Transparansi pada tingkat pendapatan zakat
3. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat
4. Landasan Teori

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban diantara semua pemangku kebijakan bagi organisasi pengelola zakat sehingga pengelolaan organisasi dalam menjalankan peran intermediasi zakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Gregory (Suryo Pratolo, 2006;87) mengemukakan bahwa “akuntabilitas sebagai suatu kebutuhan untuk memberikan sutu pelaporan atas suatu aktivitas organisasi”. Maka dari itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG 2006;5). Mardiasmo (2004:21), memberikan pengertian akuntabilitas sebagai berikut : “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”. Dari pernyataan-pernyataan mengenai Akuntabilitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Selanjutnya Andrianto (2007:21) menyatakan bahwa “transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”. Sedangkan menurut Hafiz (2000) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut : “Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan . Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan lembaga amil zakat kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban lembaga tersebut.

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip organisasi yang sehat (Fadilah, 2016:86). Prinsip ini menjadi penting diterapkan di organisasi pengelola zakat seperti LAZ. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukrisno (2005;15) bahwa prinsip pertanggungjawaban atau responsibility menunjukan bahwa setiap individu dalam organisasi harus bertanggungjawab atas segala tindakannya, terutama berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada adanya system yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban organisasi kepada *shareholder, stakeholder* dan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku (Fadilah, 2016;87). Pertanggungjawaban pada aspek sosial menuntut organisasi untuk mempunyai filosofi bahwa suatu organisasi adalah sebuah entitas publik yang berada pada lingkungan global dan memberikan kontribusi kepada publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial organisasi sebagai bagian dari masyarakat (I Ketut Mardjana, 2002;31).

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah oleh penulis, menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di LAZ kota Bandung dikategorikan “sangat baik”, selanjutnya penerapan Transparansi di LAZ kota Bandung dikategorikan “sangat baik”, begitupun dengan penerapan pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat di LAZ kota Bandung dikategorikan “sangat baik”. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**SKOR TANGGAPAN RESPONDEN ATAS VARIABEL AKUNTABILITAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jawaban Responden | Jumlah | Skor Total | Skor Ideal | Kriteria |
| **STS****(1)** | **TS****(2)** | **KS****(3)** | **S****(4)** | **SS****(5)** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| Jumlah | (0x1)=0 | (0x2)=0 | (0x3)= | (33x4)=132 | (51x5)=255 |  | 387 | **420** | **90%** |

 Hasil Pengolahan Data 2018

**Tabel 1.2**

**SKOR TANGGAPAN RESPONDEN ATAS VARIABEL TRANSPARANSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jawaban Responden | Jumlah | Skor Total | Skor Ideal | Kriteria |
| **STS****(1)** | **TS****(2)** | **KS****(3)** | **S****(4)** | **SS****(5)** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 80 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 80 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 80 % |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 96,7 % |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | 30 | 93,3 % |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| Jumlah | (0x1)=0 | (0x2)=0 | (1x3)=3 | (40x4)=160 | (26x5)=130 |  | **293** | **330** | **84 %** |

Hasil Pengolahan Data 2018

**Tabel 1.3**

**SKOR TANGGAPAN RESPONDEN ATAS VARIABEL PERTANGGUNGJAWABAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jawaban Responden | Jumlah | Skor total | Skor ideal | Kriteria |
| **STS****(1)** | **TS****(2)** | **KS****(3)** | **S****(4)** | **SS****(5)** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 30 | 100 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | 86,7 % |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 90 % |
|  | (0x1)=0 | (0x2)=0 | (0x3)=6 | (10x4)=40 | (14x5)=70 |  | **110** | **120** | 93 % |

Hasil Pengolahan Data 2018

1. Akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat

Analisis Akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat di LAZ kota Bandung menggunakan 14 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 4.19 menunjukan bahwa persentase perolehan jawaban responden mengenai Transparansi di LAZ Kota Bandung adalah sebesar 90 %.. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan akuntabilitas, LAZ dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan indikator akuntabilitas tersebut. Hasil tanggapan responden yang telah diolah, dapat menunjukkann bahwa penerapan akuntabilitas merupakan strategi yang dapat membantu LAZ dalam meningkatkan pendapatan zakatnya.

1. **Transparansi pada tingkat pendapatan zakat**

Analisis transparansi pada tingkat pendapatan zakat di LAZ kota Bandung menggunakan 11 indikator. Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 4.19 menunjukan bahwa persentase perolehan jawaban responden mengenai Transparansi di LAZ Kota Bandung adalah sebesar 86 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan transparansi, LAZ dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan indikator transparansi tersebut. Hasil tanggapan responden yang telah diolah, dapat menunjukan bahwa penerapan transparansi merupakan strategi yang dapat membantu LAZ dalam meningkatkan pendapatan zakatnya.

1. **Pertanggungjawaban Pada Tingkat Pendapatan Zakat**

Analisis pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat di LAZ kota Bandung menggunakan 2 indikator. Pada variabel pertanggungjawaban terdiri atas 4 item pernyataan dan jumlah responden 6 orang, diperoleh total skor sebesar 110, Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden mengenai variabel pertanggungjawaban diperoleh nilai persentase jawaban yakni 93% yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan pertanggungjawaban, LAZ dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan indikator pertanggungjawaban tersebut. Hasil tanggapan responden yang telah diolah, dapat menunjukkann bahwa penerapan pertanggungjawaban merupakan strategi yang dapat membantu LAZ dalam meningkatkan pendapatan zakatnya.

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis akuntabilitas pada tingkat pendapatan zakat

berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 4.19 menunjukan bahwa persentase perolehan jawaban responden mengenai Transparansi di LAZ Kota Bandung adalah sebesar 90% yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi.

1. Analisis transparansi pada tingkat pendapatan zakat

berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 4.19 menunjukan bahwa persentase perolehan jawaban responden mengenai Transparansi di LAZ Kota Bandung adalah sebesar 86 %3 yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi.

1. Analisis pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat

Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi data jawaban responden mengenai variabel pertanggungjawaban diperoleh nilai persentase jawaban yakni 93% yang berarti dapat di interpretasikan dalam kategori sangat tinggi.

Saran

1. Akuntabilitas, transparansi dan petanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting sehingga harus diterapkan seluruhnya dengan baik oleh setiap Lembaga Amil Zakat. Bagi ke 6 LAZ tingkatkan terus prinsip ke akuntabilitasan, transparansi dan pertanggungjawaban.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan proses penelitian selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan saat ini, yaitu dengan menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yang diyakini dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan zakat, seperti Variabel Kualitas Informasi
3. Daftar Pustaka

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang : Bayumedia Publising.

Fadilah, Sri. 2016. *Tata kelola dan akuntansi zakat,* Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Hafiz, 2000. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.

 . 2011*. Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 2, No. 1, 4-7.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012a. *PSAK No. 109 (revisi 2011) tentang Akuntansi zakat infaq* sedekah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

 . 2012b. *PSAK No. 23 (revisi 2010) tentang pendapatan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

KNKG. 2004. *Pedoman Umum Good Coorporate Governance,* Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance.

 . 2006 *Pedoman Kebijakan Governance,* Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance.

Mahmudi. 2009. *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*. Ekbisi, Vol: 4 No: 1:69-84.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

PA-OPZ, 2005. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat.